

Bulan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tahun: 2 0 2 4

tanggal: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Media: | Radar Sampit | Halaman: |
| Kompas | Kalteng Pos | Borneo News |
| Elektronik | Palangka Post | Tabengan |

kaltengtoday.com

Belanja APBD Perubahan Harus Bersifat Prioritas

Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (**Gumas**) menggelar rapat paripurna Tahun 2024. Hal tersebut, berkaitan dengan agenda laporan badan anggaran (**Banggar**) terhadap hasil pembahasan Raperda perubahan **APBD** tahun ini.

Anggota DPRD Gumas selaku Jubir Banggar Iceu Punamasari mengatakan, terkait pendapatan sebelum perubahan ditargetkan sebesar satu triliun lebih. Kemudian pendapatan setelah perubahan mengalami penurunan beberapa persen.

Oleh karena itu, jelas Iceu, Pihak DPRD Kabupaten **Gumas** dan Banggar sangat memahami, bahwa penurunan pendapatan tersebut berasal dari pos lain-lain pendapatan yang dianggap sah.

“Saran kami untuk belanja APBD perubahan hendaknya diarahkan yang sifatnya Prioritas dan mendesak terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan yang mengalami kerusakan. Maka tidak terjadi terhambatnya pelayanan kepada masyarakat,” katanya. Rabu (9/10/2024).

Kemudian, jelas dia, untuk Perangkat Daerah terkait agar segera menciptakan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat yang berbasis Pertanian, Perikanan dan peternakan guna mendukung program pemerintah dan sesuai visi misi yang tertuang di **RJPM**.

“Dengan program pemda begitu, usaha masyarakat yang selama ini mengandalkan usaha dari Pertambangan tanpa izin atau PETI dapat dialihkan,” terang dia.

Kemudian, tambah dia, dengan adanya keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang diberikan batas waktu sampai tanggal 28 November 2023, agar Pemda melalui BKPSDM mempersiapkan dan memfasilitasi PTT yang ada untuk diangkat menjadi PPPK.

“Maka kedepannya mereka diprioritaskan masuk CPNS atau P3K ke depannya. Lalu, tetap mengupayakan untuk kerjasama dengan PBS dalam menampung tenaga kerja lokal atau PTT serta masyarakat kita,” pungkask dia. **[Red]**

<https://kaltengtoday.com/belanja-apbd-perubahan-harus-bersifat-prioritas-3/>